PENGEMBANGAN MASYARAKAT MELALUI BUMDES BERSAMA SARASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT KECAMATAN ANGKOLA SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bidang Pengembangan Masyarakat Islam

OLEH

HAIDIR NASUTION

NIM. 14 303 00005

PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

TAHUN 2021

PENGEMBANGAN MASYARAKAT MELALUI BUMDES BERSAMA SARASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT KECAMATAN ANGKOLA SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bidang Pengembangan Masyarakat Islam

OLEH

HAIDIR NASUTION

NIM. 14 303 00005

PEMBIMBING I

Drs.H. Armyn Hasibuan, M.Ag
NIP. 19620924 199403 1 005

PEMBIMBING II

Risdawati Siregar, S.Ag, M.Pd
NIP. 19760302 200312 2 001

PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

TAHUN 2021

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

Hal : Skripsi
A.n. : Haidir Nasution
Lampiran : 6 (Enam) Examplar

Padangsidimpuan, Oktober 2021
Kepada Yth:

Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan

Di:
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **HAIDIR NASUTION** yang berjudul: **"Pengembangan Masyarakat Melalui BUMDes BERSAMA SARASI dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Masyarakat Kecamatan Angkola Selatan"** maka kami menyatakan bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Sosial (S. Sos.) dalam bidang Ilmu pengembangan masyarakat Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut telah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PEMBIMBING I

Drs. H. Armyn Hasibuan, M.,Ag
NIP. 19620924 199403 1 005

PEMBIMBING II

Risdawati Siregar, S.Ag, M.Pd
NIP. 19760302 200312 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HAIDIR NASUTION**
Nim : **1430300005**
Fak/Prodi : **Pengembangan Masyarakat Islam/PMI**

Judul Skripsi : **Pengembangan Masyarakat Melalui Bumdes Bersama Sarasi Dan Implikasinya Terhadap ekonomi Masyarakat Kecamatan Angkola Selatan''**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat ke 4 kode etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, Juli 2021
Membuat Pernyataan

METERAI TEMPEL
23815AHF944021359
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Haidir Nasution

NIM : 1430300005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5SihitangPadangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

SebagaicivitasakademikInstitut Agama Islam NegeriPadangsidimpuan, saya yang bertandatangan di bawahini:

Nama	: HAIDIR NASUTION
Nim	: 14 303 00005
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam
Fakultas	: FDIK
JenisKarya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif** (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Pengembangan Masyarakat Melalui BUMDes Bersama Sarasi Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Masyarakat Kecamatan Angkola Selatan.** Serta Perangkat Yang Ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif iInstitut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, Oktober 2021
Saya yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
245EDAJX538846078

HAIDIR NASUTIO
NIM. 14 303 00005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
JalanTengku Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama	:	**Haidir Nasution**
NIM	:	**14 303 00005**
Judul skripsi	:	**PENGEMBANGAN MASYARAKAT MELALUI BUMDES BERSAMA SARASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT KECAMATAN ANGKOLA SELATAN**

Ketua

Risdawati Siregar, S.Ag, M.Pd
NIP. 19620926 199303 1 001

Sekretaris

Dr. Anas Habibi Ritonga, MA
NIP. 19840403 201503 1 004

Anggota

Drs. H. Armyn Hasibuan, M.Ag
NIP. 19620924 199403 1 005

Risdawati Siregar, S.Ag, M.Pd
NIP. 19620926 199303 1 001

Drs.H. Armyn Hasibuan, M.Ag
NIP. 19620924 199403 1 005

Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP. 19651102 199103 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidimpuan
Tanggal	: 16 Juli 2021
Pukul	: 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai	: 70 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,0
Predikat	: Sangat Memuaskan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor : 1421 /In.14/F.4c/PP.00.9/10/2021

Skripsi Berjudul	: **PENGEMBANGAN MASYARAKAT MELALUI BUMDES BERSAMA SARASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EKONOMI MASYRAKAT KECAMATAN ANGKOLA SELATAN**
Ditulis oleh	: **HAIDIR NASUTION**
NIM	: **1430300005**
Program Studi	: **Pengembangan Masyrakat Islam**

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidimpuan, 28 Oktober 2021
Dekan FDIK

Dr. Ali Sati, M.Ag
NIP.197909261993031001

ABSTRAK

Nama : **Haidir Nasution**
Nim : **1430300005**
Fakultas : **Dakwah dan Ilmu Komunikasi**
Judul Skripsi :**Pengembangan Masyarakat Melalui BUMDes BERSAMA SARASI dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Masyarakat Kecamatan Angkola Selatan**

BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat. Menurut undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat BUMDes BERSAMA SARASI dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Angkola Selatan.

Metode penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan mengunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawamcara dan dokumentasi. Yang menjadi sumber penelitian berasal dari Kepala Unit BUMDes, Staf BUMDes, dan masyarakat yang ikut serta dalam program BUMDes BERSAMA SARASI.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa terdapat temuan umum dan temuan khusus, dimana temuan umum ini terdapat beberapa bagian yaitu *gambaran umum, demografis dan wilayah, dan mata pencaharian.* Temuan khusus ini terdapat beberapa bagian yaitu Implikasi BUMDes terhadap ekonomi masyarakat, Faktor - Faktor Pendukung dan Penghambat BUMDes BERSAMA SARASI yang mana faktor pendukung ini terdapat beberapa bagian yaitu *kerja sama, Niat dan uasaha individu dalam berusaha, Potensi SDA, Dukungan dari masyarakat dan pemerintah Desa.* Dan Faktor Penghambat BUMDes BERSAMA SARASI terdapat beberapa bagian yaitu *Minimnya SDM, Minimnya Anggaran Dana Kepada Masyarakat, Kurangnya Pengelolaan Keuangan Masyarakat.*

Kata Kunci : Pengertian BUMDes, Prinsi – prinsip BUMDes, Tujuan BUMDes, Faktor Pendukung dan Penghambat, serta Implikasinya Terhadap Ekonomi Masyarakat BUMDes BERSAMA SARASI Kecamatan Angkola Selatan.

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Surat Halaman Menyusun Skripsi

Surat Persetujun Publikasi

Abstrak i

Kata Pengantar ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 4

C. Rumusan Masalah 4

D. Tujuan Penelitian 5

E. Kegunaan Penelitian 5

F. Batasan Istilah 6

G. Sistematika Pembahasan 8

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengembangan Masyarakat 10

1. Pengertian Pengembangan 10
2. Pengertian Masyarakat 11
3. Pengembangan Masyarakat 13
4. Prinsip Pengembangan Masyarakat 17
5. Model – model Pengembangan Masyarakat 19

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 20

1. Pengertian BUMDes 20
2. Perkembangan BUMDes BERSAMA SARASI 22
3. Tujuan BUMDes 23
4. Prinsip – prinsip Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 25
5. Pembentukan BUMDes 27
6. Kegiatan Simpan Pinjam BUMDes BERSAMA SARASI 30
7. Peran BUMDes Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat 31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 32
B. Jenis Penelitian dan Pendekatan..... 32
C. Subjek Penelitian..... 33
D. Sumber Data..... 33
E. Teknik Pengumpulan Data..... 34
F. Teknik Analisis Data..... 36
G. Teknik Keabsahan Data 38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Temuan Umum..... 40
2. Temuan Khusus..... 45
   a. Implikasi BUMDes terhadap ekonomi masyarakat..... 45
   b. Faktor - Faktor Pendukung dan Penghambat BUMDes BERSAMA SARASI..... 50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 61
B. Saran..... 62

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan masyarakat akhir-akhir ini cukup menyita perhatian publik seiring dengan kesadaran masyarakat dalam ranah pembangunan. Kondisi ini dilihat dari banyaknya aktivis-aktivis sosial yang terlibat dalam kegiatan pembangunan berbasis komunitas atau akar rumput melelui skema aksi-aksi pengembangan masyarakat.

Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam segala kegiatan pembangunan, maka secara tidak langsung mereka telah memperkuat kemampuan bangsanya sendiri dalam menghadapi dinamika perubahan pada tingkat regional, nasional maupun global. Pembangunan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dimana usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan masyarakat secara keseluruhan dilakukan secara berkelanjutan yang berlandaskan pada potensi dan kemampuan.[1]

Pengembangan masyarakat dalam konteks ini dapat di tafsirkan sebagai pembangunan nasional yang mendorong adanya pembangunan regional. Dimana pengembangan dan pemberdayaan menekankan pentingnya pembangunan berbasis dan *top down*. Gagasan seperti ini didasari oleh sebuah cita-cita untuk mengembangkan, merekonstruksi

[1] Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hal 3.

struktur masyarakat agar menjadi lebih berdaya melalui regulasi yang lebih menekankan program implementasi yang bepihak pada kepentingan rakyat kecil. Pendekatan yang digunakan dalam model pembangunan masyarakat adalah pembangunan tingkat lokal atau menyatu dengan budaya lokal.

BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa. Lebih lanjut sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi diperdesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga masyarakat. Namun di Kecamatan Angkola Selatan ini usaha BUMDes sudah maksimal dalam mengembangkan masyarakat di Kecamatan Angkola Selatan ini, namun ada beberapa program kerja yang harus dijalankan untuk mengembangkan masyarakat.

Setelah berakhirnya program nasional pemberdayaan masyarakat desa mandiri pedesaan atau PNPM MPD, ada dua hal yang diwarisi oleh program tersebut yaitu aset berupa infratruktur dan aset dana bergulir juga pelaku ditingkat Kecamatan seperti BKAD, BP-UPK dan PL sesuai dengn surat menteri desa, PDT dan transmigrasi Repuplik Indonesia tentang panduan pendataan dan perlindungan kegiatan permodalan PNPM-MPD.

Pada bulan agustus 2016 di hotel PIA Batu Nadua Padangsidimpuan di adakan local karya membahas tentang badan hukum pengelolaan dana bergulir peninggalan ex PNPM-MPD yang kemudian bersepakat menjadikan pengelolaan dana bergulir menjadi Badan Usaha Milik Desa BERSAMA sesuai dengan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 juga permendes nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengawasan dan pengelolaan dna pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang hadiri oleh seluruh perwakilan BKAD dan UPK sekapubten Tapanuli Selatan.

Berdasarkan hal tersebut BUMDes ditindak lanjuti dengan musyawarah antar desa menyepakati badan hukum dan anggaran dasar daan anggaran rumah tangga dengan perwakilan masyarakat Angkola Selatan. Pada tanggal 28 Februari 2007 melalui musyawarah antar desa pertanggung jawaban laporan BUMDes BERSAMA Anggkola Selatan disepaakati perubahan nama BUMDes dari BUMDes BERSAMA Angkola Selatan menjadi BUMDes BERSAMA SARASI Kecamatan Angkola Selatan.

BUMDes BERSAMA SARASI Kecamatan Angkola Selatan mempunyai modal dari peralihan aset PNPM Mandiri perdesaan Kecamatan Angkola Selatan sebesar Rp. 2.100.749.347,- modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, sumbangan, hibah dan lain-lain yang tidak mengikat.

Susuai dengan latar belakang masalah tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengembangan Masyarakat Melalui BUMDes BERSAMA SARASI Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Angkola Selatan".** [2]

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini lebih difokuskan pada Pengembangan Masyarakat Melalui BUMDes BERSAMA SARASI Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Angkola Selatan.

C. Rumusan Maslah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

a. Bagaimana implikasi BUMDes BERSAMA SARASI dalam meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Angkola Selatan?

---

[2] BUMDes, *Pengembangan Masyarakat Melalui BUMDes Berasama Sarasi Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Masyarakat*, Angkola Selatan.

b. Apa faktor pendukung dan penghambat BUMDes BERSAMA SARASI dalam meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Angkola Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui implikasi BUMDes BERSAMA SARASI dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Angkola Selatan.
b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat BUMDes BERSAMA SARASI dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Angkola Selatan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu bahan kajian dalam pengembangan masyarakat melalui BUMDes BERSAMA SARASI di Kecamatan Angkola Selatan.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan implikasi BUMDes BERASAMA SARASI dalam peningkatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Angkola Selatan
2. Praktis
   a. Bagi peneliti dapat memperoleh wawasan pengetahuan secara langsung tentang Kinerja PNPM dalam Penyaluran Dana Ekonomi

Bergulir untuk Memberdayakan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Angkola Selatan

b. Sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di IAIN Padangsidimpuan.

c. Bahan perbandingan kepada peneliti lain yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.

F. Batasan Istilah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah, antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan

Pengembangan Masyarakat adalah kemampuan suatu negara atau suatu bangsa untuk terus berkembang baik secara kualitatif atau kuantitatif yang mencakup seluruh segi kehidupan bernegara dan bermasyarakat dan karena tidak berkembang hanya dalam arti peningkatan taraf hidup saja akan tetapi dalam segi kehidupan lainnya, manusia bukan hanya makhluk ekonomi, akan tetapi juga makhluk sosial dan makhluk politik. Oleh karena itu perlu diadakan perubahan struktur ekonomi dan non ekonomi.

Menurut Supardi bahwa pengembangan masyarakat itu adalah suatu proses dimana anggota masyarakat pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudian merencanakannya dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut. Pengembangan masyarakat juga merupakan suatu gerakan

untuk menciptakan sesuatu kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat dengan berpartisipasi aktif dan inisiatif masyarakat itu sendiri.[3]

Dalam penelitian ini yang dimaksud dalam pengembangan disini adalah usaha yang dilakukukan oleh BUMDes tehadap masyarakat, supaya masyarakat dapat berkembang secara terus menurus dengan mengutamakan nilai-nilai adil dan menghargai satu dengan yang lainnya.

2. Masyarakat

   Masyarakat merupakan kelompok manusia yang saling terkait dan terikat oleh sistem-sistem, adat-istiadat, dan hukum - hukum tertentu.[4] Masyarakat yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah masyarakat di Kecamatan Angkola Selatan.

3. BUMDes

   BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa.

4. Implikasi

   Implikasi adalah konsekuensi dari penerapan suatu program atau kebijakan yang bersifat tidak baik ataupun baik bagi mereka yang ditargetkan oleh program atau kebijakan tersebut.

---

[3] Supardi, *Dakwah Islam Dengan Pengembangan Masyarakat Desa*, (Bandung: Madar Maju, 2001), hal. 24-27.

[4] Tilar, *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*, (Bandung : Rosda Karya, 1999), hal. 9.

5. Ekonomi

Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan kegiatan produksi, distribusi dan lain sebagainya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, penulis menggunakan kerangka penulisan dengan sistematis yang mana terdiri dari 5 bab dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yakni sebagai berikut:

BAB I, Bab ini merupakan Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, Bab ini merupakan penjelasan tentang Tinjauan pustaka, yang meliputi pembahasan tentang Pengertian Pengembangan Masyarakat, BUMDES, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kajian Terdahulu.

BAB III, Bab ini merupakan pembahasan tentang Metodelogi Penelitian, yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian dan pendekatan, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

BAB IV**,** Pembahasan tentang hasil penelitian yang mempunyai sub pembahasan : temuan umum, temuan khusus yang memiliki pembahasan tentang pengembangan masyarakat melalui BUMDES dan implikasi BUMDES terhadap ekonomi masyarakat.

BAB V, Penutup, yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengembangan Masyarakat

1. Pengertian Pengembangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan. Dan lebih dijelaskan lagi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya WJS Poerwadarminta, bahwa pengembangan adalah perbuatan menjadikan bertambah, berubah sempurna (pikiran, pengetahuan dan sebagainya).[5]

Dari uraian diatas pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi suatu produk. Pengembangan dapat berupa proses, produk dann rancangan.menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan pengembangan adalah metode pengembangan yang dipergunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Pendapat tersebut pengembangan pengembangan berarti memiliki orientasi terhadap produk yang teruji efektivitasnya.

Pengembangan merupakan sebuah penelitian, biasanya digunakan dalam pendidikan yang disebut penelitian pengembangan. Penelitian pendidikan dan pengembangan, yang lebih kita kenal dengan istilah *Research & Development*. Penelitian dan pengembangan ini

[5] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional Indonesia,2014), hal. 201.

kadang kala disebut juga sebagai suatu pengembangan berbasis pada penelitian atau disebut juga *research-based development.*

Penelitian pengembangan memfokuskan kajiannya pada bidang desain atau rancangan, apakah itu berupa model desain dan desain bahan ajar, produk misalnya media, bahan ajar dan juga proses.4 Penelitian pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk baru melalui proses pengembangan. Sehingga makna dari penelitian pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan.[6]

Disimpulkan bahwa pengembangan adalah proses atau langkah-langkah yang dilakukan dengan merancang, membuat atau menyempurnakan suatu produk yang sesuai dengan acuan dan kriteria dari produk yang dibuat. Tujuan dari penelitian pengembangan yakni untuk menghasilkan suatu produk melalui proses pengembangan dan melalui perubahan-perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu akibat dari produk tersebut.

2. Pengertian Masyarakat

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut " *society* " asal kata *"sociuc "* yang berarti kawan. Adapun kata "masyarakat" berasal dari bahasa Arab yaitu "syirk " yang berarti bergaul atau dalam bahasa ilmiahnya interaksi. Adanya saling bergaul itu tentu karena adanya

[6] Sukiman, *Pengembangan Media Pembelajaran*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2012), hal. 53.

bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain. Arti yang lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan sosial maupun ikatan-ikatan kasih sayang yang erat.[7]

Kata masyarakat hanya terdapat dalam dua bahasa yakni Indonesia dan Malaysia. Kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang artinya berhubungan dan pembentukan suatu kelompok atau golongan. Masyarakat menurut Para ahli Sosiologi adalah sebagai berikut :

a. *Mac Iver dan Page* mendefinisikan masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan selalu berubah.
b. *Koentjaraningrat* mendefinisikan masyarakat adalah kesatuan hidup makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu.
c. *Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi* menyebut masyarakat adalah tempat orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.[8]

Dalam pengertian lain masyarakat atau disebut *community* (masyarakat setempat) adalah warga sebuah desa, sebuah kota, suku atau suatu negara. Apabila suatu kelompok itu baik, besar maupun kecil, hidup bersama, memenuhi kepentingan-kepentingan hidup bersama, maka disebut masyarakat setempat.

---

[7] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* , (Jakarta: Aksara Baru, 2000), hal. 157.

[8] Ari H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, , (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 14.

Dari pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa masyarakat adalah satu kesatuan manusia (sosial) yang hidup dalam suatu tempat dan saling bergaul (interaksi) antara satu dengan yang lain, sehingga memunculkan suatu aturan (adat/norma) baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan membentuk suatu kebudayaan.

3. Pengembangan Masyarakat

Secara umum pengembangan masyarakat (*community development*) dalam bahasa Arab disebut dengan *tathwirul mujtama' il-islamiy* adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya.[9]

Gagasan pengembangan masyarakat muncul sebagai sebuah respon dari gagalnya kegiatan-kegiatan pembangunan. Meskipun program pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, namun konsep tersebut tidak mempertimbangkan kondisi yang sebenarnya sehingga mengakibatkan hilangnya kapasitas dan kesadaran masyarakat untuk bertindak. Konsep pembangunan dianalisis gagal karena orientasi pembangunan hanya pada sektor kebutuhan masyarakat yang bersifat fisik, yang dianalisir mengakibatkan ketergantungan masyarakat terhadap program pemerintah. Kalau pada

[9] Arif Budimanta, *Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development*, (Jakarta: CSD, 2008), hal. 33.

konsep Negara kesejahteraan, pemerintah campur tangan langsung pada pengelolaan dan distribusi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pada konsep pengembangan masyarakat, lebih ditekankan pada upaya pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat sendiri (*community-base service*) dengan ide utama keberlanjutan dalam penyelenggaraan kebutuhan hidup manusia karena dikembangkannya keswadayaan (*self-reliance)* masyarakat.

Pengembangan masyarakat dikenal dengan istilah *Community Development. Community Development* makna yang penting dari dua konsep yaitu : *community* yang bermakna "kualitas hubungan sosial" dan *Development* bermakna "perubahan kearah kemajuan yang terencana dan bersifat gradual.[10]

Perubahan yang dimaksud di atas adalah perubahan yang bersifat transformatif yang lahir langsung dari masyarakat, yang terjadi melalui proses yang alami melalui perubahan. *Community development* adalah suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas, kedalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional. Terlepas dari berbagai pandangan di atas yang jelas beberapa teori di atas sangat membantu kiprah dan aktivitas dakwah, yang pada

[10] Soetomo, *Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 79.

gilirannya akan mempengaruhi arah atau tujuan pengembangan masyararakat.

Usaha yang dilakukan supaya masyarakat dapat berkembang secara terus menurus dengan mengutamakan nilai-nilai adil dan menghargai satu dengan yang lainnya.[11] Masyarakat adalah sekumpulan atau sejumlah besar orang yang menyatu dan menempati wilayah tertentu.[12] Defenisi lain mengatakan masyarakat merupakan kelompok manusia yang saling terkait dan terikat oleh sistem-sistem, adat-istiadat, dan hukum - hukum tertentu.

Pengembangan masyarakat adalah suatu langkah bersosial dengan upaya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat memaksimalkan sumber daya manusia dan sumber daya alam. [13] Konsep pengembangan masyarakat adalah sebuah proses berkelanjutan yang dapat diwujudkan melelui keterkaitan alam, aspek sosio-ekonomi dan kultur yang berjalan dinamis, dimana arah investasi, orientasi perkembangan teknologi dan perubahan kelembagaan konsisten dengan kebutuhan masyarakat baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang.[14] Sedangkan menurut A. Supardi bahwa pengembangan masyarakat itu adalah suatu proses dimana anggota masyarakat

---

[11] Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternative*, (Jogjakarta: A-ruzz Media, 2007), hal. 18.

[12] Acep Aripudin, *Sosiologi Dakwah,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 23.

[13] Edi Soharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan dan Pekerjaan Social*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hal. 37.

[14] Moeljarto Tjokrowinoto. *Pembangunanan Dilema Dan Tantangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 12.

pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudian merencanakannya dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut.[15]

Pengembangan masyarakat juga merupakan suatu gerakan untuk menciptakan sesuatu kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat dengan berpartisipasi aktif dan inisiatif masyarakat itu sendiri. Pengembangan masyarakat adalah komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depannya.

Dari definisi tersebut bahwa pengembangan masyarakat itu adalah usaha pembangunan masyarakat yang dilakukan sendiri oleh masyarakat, masyarakat berkumpul memusyawarahkan tentang kebutuhan tersebut, menginvestasikan sesuai dengan tingkat atau derajat kebutuhan itu baik dari segi kepentingan umum maupun dari segi lainya. Setelah memusyawarahkan identifikasi kebutuhan serta akan dilaksankan. Setelah perencanaan dan program selesai disusun maka barulah kemudian sampai kepada pelaksanaan, mengerjakan bersama dengan menggunakan teknis gotong royong.

Sementara itu, definisi pengembangan masyarakat secara substansial merupakan proses retrukturisasi masyarakat yang dilakukan dengan adanya pola swadayapartisif dalam mengelola dan mengorganisasikan kehidupan sosial-eknomi, sehingga masyarakat

---

[15] Supardi. *Manajemen Masjid dalam Pembangunan Masyarakat: Optimalisasi Peran dan Fungsi Masjid*, (Jakarta: UII Press, 1987), hal. 24.

memiliki peluang untuk memenuhi kebutuhannya dibanding waktu 36 sebelumnya. Pengembangan masyarakat dalam konteks ini bertujuan untuk mengembangkan masyarakat lapis bawah dengan mengidentifikasi kebutuhan, adanya sumber daya dalam memenuhi kebutuhan, serta memberdayakan masyarakat secara partisipatif, dimana perencanaan pembangunan menggunakan proses dan mekanisme yang bersifat *bottom up.* Dengan demikian pengembangan masyarakat memiliki fokus pada upaya membantu anggota masyarakat untuk saling berkerjasama dalam melakukan kegiatan agar tercapainya kebutuhan bersama.

Berdasarkan teori di atas dapat dipahami bahwa pengembangan masyarakat adalah usaha yang sudah terkonsep dengan baik untuk menjadikan masyarakat mandiri dalam seluruh aspekk sendi kehidupan dengan termanfaatkannya sumberdaya yang ada dari masyarakat itu sendiri baik sumberdaya manusia ataupun sumberdaya alam untuk kebahagian mereka dalam menjalani hidup.

4. Prinsip Pengembangan Masyarakat

Prinsip dasar pengembangan masyarakat (*community development*) telah muncul dalam berbagai diskusi, mulai dari perspektif Ekologi sampai dengan pandangan pentingnya keadilan sebagai dasar pengembangan seperangkat prinsip-prinsip pengembangan masyarakat yang digunakan dalam pendekatan pembangunan praktek kerja di suatu komunitas.

Menurut Jim Ife dalam bukunya *Community Development*, pengembangan masyarakat mempunyai 22 prinsip. Prinsip-prinsip diasumsikan menjadi pertimbangan bagi sukses atau tidaknya suatu kegiatan pengembangan masyarakat dan dianggap konsisten dengan semangat keadilan sosial dan sudut pandang ekologis. Adanya prinsip dimaksudkan sebagai acuan dalam penggunaan pendekatan pengembangan masyarakat yang sesuai dengan lapangan. Prinsip-prinsip pengembangan masyarakat yang dimaksud ialah:

a) *Integreted Development* (Pengembangan Terpadu).
b) *Confronting Structural Disadvantage* (Konfrontasi dengan Kebatilan Struktural).
c) *Human Rights* (Hak Asasi Manusia).
d) *Sustainability* (Keberlanjutan)
e) *Empowermert* (Pemberdayaan).
f) *The Personal and The Political* (Pribadi dan Politik).
g) *Community Ownership* (Kepemilikan Komunitas).
h) *Self-Reliance* (Kemandirian).
i) *Independence from state* (Ketidak tergantungan pada Pemerintah).
j) *Immediate Goals and Ultimate* (Tujuan dan Visi).
k) *Organic Development* (Pembangunan bersifat Organik).
l) *The Pace of Development* (Kecepatan Gerak Pembangunan),
m) *External Experties* (Keahlian Pihak Luar).
n) *Community Building* (Membangun Komunitas).
o) *Process and Outcome* (Proses dan Hasil).
p) *The Interity of the Proses* (Keterpaduan Proses).
q) *Non- Violence* (Tanpa kekerasan).
r) *Inclusiveness* (Inklusif).
s) *Consensus* (Konsensus).

t) *Co-operation* (Kerja Sama).
u) *Participation* (Partisipasi).
v) *Defining Need* (Mendefinisikan Kebutuhan).[16]

Konsep pengembangan masyarakat juga merupakan implementasi konsep pembangunan berbasis masyarakat, yaitu mengubah pembangunan yang bersifat *Top-Down* yang menfokuskan pada pelayanan kebijakan dari atas menjadi *Bottom Up*. Pembangunan yang bersifat *Bottom Up* merupakan model perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif. Isu yang akan menjadi program dalam perencanaan digali dari bawah yang diyakini sebagai masalah dan kebutuhan nyata masyarakat, yang tentunya mengubah konsep *Top-Down*, yang perencanaannya terpusat oleh perencana professional yang merupakan aparat pemerintah.

5. Model-Model Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat dibangun berdasarkan dua perspektif, yaitu perspektif profesional yang menitikberatkan pada usaha meningkatkan kemandirian dan memperbaiki sisitem pemberian pelayanan dalam kerangka relasi-relasi sosial, dan perspektif radikal yang berfokus pada upaya mengubah ketidak seimbangan relasi relasi sosial melalui pemberdayaan kelompok lemah, mencari sumber kelemahannya, dan menganalisis sumber ketertindasannya. ada enam model pengembangan masyarakat, yaitu:

[16] Jim Ife, *Community Development: creating community Alternati-ves-Vision, Analysis and Practice, (Melbourne: Addison Wesley Longman,*2000), hal. 178.

a. Model perawatan masyarakat yakni kegiatan voluntir untuk mengurangi kesenjangan legalitas.
b. Model pengorganisasian masyarakat yakni kegiatan oleh lembaga swadaya masyarakat yang bertujuan melakukan perbaikan kordinasi antar berbagai lembaga yang menangani kesejahteraan sosial.
c. Model pembangunan masyarakat yaitu kegiatan yang memberikan perhatian pada peningkatan ketrampilan dan kemandirian masyarakat dalam menangani problema yang dihadapi masyarakat.
d. Model aksi masyarakat yaitu kegiatan-kegiatan yang bertujuan membangkitkan kelompok-kelompok masyarakat lemah untuk meningkatkan kemampuan.
e. Model gender yaitu kegiatan yang bertujuan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.
f. Model anti Rasisme yaitu kegiatan yang bertujuan memperjuangkan kesamaan dan kesempatan antar berbagai ras dan etnik.[17] Ayub M. Padangaran, Management Proyek Pengembangan Masyarakat.

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

1. Pengertian BUMDES

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal

[17] Ayub M. Padangaran, *Management Proyek Pengembangan Masyarakat*, (Kendari: Unhalu Press, 2011), hal. 36-37.

dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar -besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu *member base* dan *self help*.[18] Hal ini penting mengingat bahwa profesionalime pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (member base), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (self help), baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara professional dan mandiri.

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa berdirinya Badan Usaha Milik desa ini karena sudah diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa. Pilar lembaga BUMDes ini merupakan institusi sosialekonomi desa yang betul-betul mampu

[18] Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: KEMENDES, 2015), hal. 11.

sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetisi ke luar desa. BUMDes sebagai institusi ekonomi rakyat lembaga komersial, pertama-tama berpihak kepada pemenuhan kebutuhan (produktif maupun konsumtif) masyarakat adalah melalui pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa. Hal ini diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan (seperti : harga lebih murah dan mudah mendapatkannya) dan menguntungkan. Dalam hal ini, BUMDes sebagai institusi Komersiil, tetap memperhatikan efisiensi serta efektifitas.[19]

2. Perkembangan BUMDes BERSAMA SARASI

Organisasi pengelolaan BUMDes BERSAMA SARASI terpisah dari organisasi pemerintah desa/kelurahaan dan yang ada di Kecamatan Angkola Selatan. Pelaksana operasional (Kepala Unit dan staf) atau sebutan lainya ditetapkan oleh pengurus berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam anggran dasar dan anggaran rumah tangga.

Susunan kepengurusan organisasi penyelengara BUMDes BERSAMA SARASI terdiri dari:

a. Pembina Kabupaten
b. Pembina Teknis Kabupaten
c. Kordinator Operasinal Kabupaten
d. Pembina Kecamatan

[19] Jurnal Administrasi Publik(JAP), *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguat Ekonomi Desa,* Vol. 1, No. 6, hal. 1068-1076.

e. Pengurus Kecamatan:

Ketua	: Martini Marta Tilova Dalimunthe, S.Pd
Anggota	: Jumaat Parsaribu
Anggot	: Muhammad Azhari Ritonga, S.AP

f. Pelaksana Operasional BUMDes BERSAMA SARASI Kecamatan:

Kepala Unit SPP	: Siti Meida Nasution, S.Psi
Staf Barang dan Jasa	: Asrul Pandi Sipahutar, S.Sos
Staf Analisis	: Syahril Ali Siregar, S.Pd
Staf Keuangan	: Nurhidayanti Harahap, SH.[20]

3. Tujuan BUMDES

Empat tujuan utama pendirian BUMDes antara lain sebagai berikut:

a. Meningkatkan perekonomian desa,
b. Meningkatkan pendapatan asli desa,
c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.[21]

Adapun tujuan BUMDes BERSAMA SARASI di Kecamatan Angkola Selatan sebagai berikut:

[20] Siti Meida Nasution, *Kepala Unit BUMDes BERSAMA SARASI* Angkola Selatan, Wawancara 10 Juni 2021.

[21] Herry Kamaroesid, Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016, hal. 2.

1. Meningkatkan kerjasama antar desa dalam usaha ekonomi desa di kawasan pedesaan.
2. Mewadahi pelaku ekonomi desa dikawasan pedesaan dalam usaha bersama yang produktif
3. Meningkatan perekonomian desa
4. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfat untuk kesejahteran desa
5. Melindungi masyarakat desa dari mata rantai perdagangan yang tidak sehat dan tidak berpihak pada masyarakat desa
6. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
7. Mengembangkan kerjasama antar desa atau dengan pihak ketiga
8. Menciptkan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
9. Membuka lapangan kerja
10. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
11. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

BUMDES dalam Pasal 3 Permen Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 BUMDES didirikan dengan tujuan meningkatkan pendapatan Desa, meningkatkan pendapatanmasyarakat, meningkatkan potensi Desa serta dapat mensejahterakan masyarakat.

4. Prinsip-Prinsip Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

A. Prinsip BUMDes

1) Bumdes bersifat terbuka, semua warga masyarakat desa bisa mengakses semua kegiatannya.
2) Bumdes adalah bersifat sosial (Social interpreunership), tidak semata-mata mencari keuntungan.
3) Bumdes harus dikelola oleh pihak-pihak yang independen. Pengelola tidak boleh dari unsur pemerintah desa.
4) Bumdes tidak boleh mengambil alih kegiatan masyarakat desa yang sudah jalan tetapi bagaimana bumdes mengkonsolidasikan dalam meningkatkan kualitas usaha mereka.

B. Prinsip umum pengelola BUMDes

Prinsip-prinsip pengelolaan bumdes penting untuk dielaburasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Prinsip tersebut adalah:

1) Kooperatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2) Partisipatif, semua komponen yang terlibat didalam bumdes harus bersedia secara sukarela atau meminta memberikan

dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

3) Emansipatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4) Trasparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui dalam segenap lapisan masyarakat dengan mudah terbuka.
5) Akuntable, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
6) Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.[22] Terkait dengan implementasi alokasi dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan agar lebih berdaya. Hal ini adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar, sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Hal yang paling penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (Cooperatif), membangun kebersamaan/menjalin semua keretakan disemua lapisan masyarakat desa, sehingga itu menjadi gaya gotong royong (steam engine) dalam upaya

[22] Herry, *Buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes)*, hal. 13.

pengentasan kemiskinan, pengangguran dan membuka akses pasar.

C. Pembentukan BUMDes

Tujuan awal pembentukan badan usaha milik Desa (BUMDes) dimaksud untuk mendorong atau menampung sekuruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program atau proyek pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes adalah benar-benar untuk memaksimalisasikan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumberdaya manusia.

Secara spesifik, pendirian BUMDes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Perubahan sikap dan cara pandang masyarakat merupakan pondasi yang kokoh bagi terbangunnya lembaga masyarakat yang mandiri, melalui pemberdayaan para pelaku-pelakunya, agar mampu bertindak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakatnya sehari-hari. kemandirian lembaga masyarakat ini dibutuhkan sebagai wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan berkaitan dengan kebijakan publik ditingkat lokal agar lebih berorientasi kemasyarakat miskin dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), baik ditinjau dari aspek ekonomi, lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman, maupun sosial.[23]

Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai 3 tahun. Tujuannya agar pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan dewan komisaris BUMDes. Poin lain yang juga dibahas adalah melakukan proses rekruitmen dan sistem

[23] Wahyudin kessa, *perencanaan pembangunan desa*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Press, 2015), hal. 34.

penggajian dan pengupahan. Untuk menetapkan orang-orang yang akan menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan secara Musyawarah. Namun pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Selain tahap-tahap pembentukan, ada bebrapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan BUMDes yang bertuang dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 5, syarat-syarat pembentukan BUMDes di antaranya yaitu:

a. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa.
b. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat.
c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
d. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, tertama kekayaan desa.
e. Tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa.

f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakay yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

g. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

D. Kegiatan Simpan Pinjam BUMDes BERSAMA SARASI

Adapun kegiatan simpan pinjam BUMDes BERSAMA SARASI mempunyai 2 bagian yakni:

1) Individu

Adapun individu yang dimaksud yaitu simpanan perorangan, dan mempunyai syarat – syarat tertentu dari peraturan BUMDes BERSAMA SARASI yaitu:

a. harus mempunyai proposal permohonan kredit
b. Fotocopy KTP
c. Fotocopy KK / Nikah
d. Pasphoto pemohon
e. Ahli waris
f. Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa
g. Fotocopy jaminan

2) Kelompok

Kelompok yang dikatakan disini terkhusus untuk wanita dan memiliki syarat – syarat tertentu yaitu surat tanggungan renteng, yang dimaksud dengan tanggungan

renteng ini adalah menanggung biaya secara bersama-sama. Oleh karena itu, tanggung renteng bermanfaat untuk meringankan beban salah satu peminjamnya. Jika ada salah satu anggota tidak bisa melakukan pembayaran kredit, maka anggota lainnya wajib melakukan tanggung renteng atau patungan.

3. Peran BUMDes Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Menurut Seyadi peranan BUMDes adalah membangun dan pengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yaitu pengembagan masyarakat melalui BUMDes BERSAMA SERASI dan implikasinya terhadap ekonomi masyarakat, maka penelitian ini dilakukan di kecamatan Angkola Selatan yang terletak di Desa Pintu Padang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan 12 Juli 2021

B. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Berdasarkan analisis data penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan kondisi lokasi penelitian yang sebenarnya secara sistematis, faktual, dan akurat.[24] Sedangkan, penelitian kualitatif menurut *Lexy J. Moleong*, yaitu: penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, tindakan, dan lain sebagainya secara holistik dan deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

[24] Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Cipta Pustaka Media, 2014), hal. 111.

Penelitian kualitatif adalah penelitian berupa data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, pendekataan ini diarahkan pada latar belakang individu tersebut secara holistik (utuh).[25] Tujuan utama penelitian kualitatif deskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang fenomena yang sedang diselidiki, dimana peneliti sebagai instrument utamanya.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah merupakan pokok permasalahan dalam kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala Unit dan Staf BUMDes BERSAMA SARASI, anggota BUMDes dan masyarakat yang tergabung dalam program BUMDes BERSAMA SARASI di Kecamatan Angkola Selatan.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri dari dua macam sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Untuk lebih jelasnya sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang di cari, sumber data primer atau data pokok adalah Kepala Unit dan Staf BUMDes BERSAMA SARASI,

[25] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 175.

anggota BUMDes dan masyarakat yang tergabung dalam program BUMDes BERSAMA SARASI di Kecamatan Angkola Selatan.

2. Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini dan berasal dari bahan bacaan yang berupa dokumen seperti arsip atau dokumen-dokumen lain yang di butuhkan dalam melengkapi data primer.[26] Sumber data sekunder ini juga merupakan sumber data pendukung yaitu dokumen dari BUMDes, buku, jurnal, Kepala Unit dan Staf BUMDes BERSAMA SARASI, anggota BUMDes dan masyarakat yang tergabung dalam program BUMDes BERSAMA SARASI di Kecamatan Angkola Selatan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Berhubung penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka instrument pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

   Interview atau wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.[27] Wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara data tentang masalah tersebut. Defenisi lain, wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan

[26] S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksra, 2003), hal. 144.

[27] Dedy Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), hal.180.

menggunakan alat.[28] Wawancara secara garis besar dibagi dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur yaitu data yang diperoleh dari narasumber jadwal wawancara berisi sejumlah pertanyaan yang direncanakan sebelumnya, atau dengan mengumpulkan sejumlah data dari informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan dengan merajuk pada pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis agar data yang ingin diperoleh lebih lengkap dan valid.[29] Sedangkan wawancara tidak terstuktur adalah wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Berdasarkan penjelasan ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur karena peneliti lebih bebas melakukan wawancara dan lebih mudah mendapat informasi dari masyarakat.

2. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, peristiwa, tujuan dan perasaan. Pengamat dalam penelitian kualitatif tidak berusaha untuk tetap netral dan objektif tentang fenomena yang diamati. Pengamat mungkin melibatkan perasaan dan pengamalannya dalam menafsirkan hasil pengamatan.[30]

---

[28] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), hal. 193.

[29] Zainil Arifin, *Penelitian Pendidikan dan Pradigma Baru*, (Bandung : Rosdakarya,2011), hal. 233.

[30] Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kwalitatif PTK dan Penelitian Pengembangan*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2016), hal. 143.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk gambar, foto-foto, karya-karya, aktifitas dari seseorang atau kantor lembaga yang berkaitan pelaksanaanya dengan BUMDes BERSAMA SARASI di Kecamatan Angkola Selatan.[31]

Dokumentasi adalah mencari data tentang hal-hal variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, jurnal, notulen rapat, agenda dan sebagainya untuk melengkapi data perolehan lewat observasi dan wawancara. Peneliti mengumpulkan dokumentasi berupa permensos, jurnal, buku kerja BUMDes, catatan lapangan dan rekaman dalam kaitanya dengan pengumpulan data penelitian

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis induktif, yaitu pengambilan kesimpulan mulai dari pertanyaan fakta-fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Proses bersifat induktif tidak dimulai dari teori yang bersifat umum tetapi dari fakta-fakta atau data khusus berdasarkan pengamatan dari lapangan atau pengamatan empiris. Kemudian disusun ke dalam bentuk pertanyaan atau kesimpulan yang bersifat umum. Jadi, terlebih dahulu diteliti tentang fakta-fakta yang ada dilapangan baru kemudian ditarik kesimpulan.

Analisis data adalah proses menyusun data yang diperoleh dari lapangan, selanjutnya ditelaah, diperiksa keabsahan datanya dan

[31] Masri Singarimbu dan sofyan efendi, *Metode Penelitian Survey,* (Jakarta: LP3S, 1989), hlm. 263

selanjutnya ditafsirkan untuk memberi makna pada analisa. Analisa data ini dilaksanakan dengan tiga cara, yaitu :

1. Reduksi data : Data yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk uraian yang sangat banyak. Data tersebut dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok yang berkaitan masalah, sehingga memberikan gambaran tentang hasil pengamatan dan wawancara.
2. Deskripsi data : menggunakan dimensi secara sistematis, secara deduktif, dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasan.
3. Kesimpulan : data yang difokuskan dan disusun secara sistematis makna data yang disimpulkan.[32]

Sesuai dengan penjelasan diatas, analisis data dilaksanakan dengan cara mengumpulkan sejumlah data kemudian mengambil data yang berkaitan dengan masalah sehingga gambaran tentang hasil wawancara dan observasi dapat diperoleh sehingga dapat disusun dalam bentuk paparan (deskripsi) untuk mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada yang umum. Karena itu analisa yang dilakukan akan mempermudah penulis untuk menyusun kepada suatu kalimat yang sistematis dalam sebuah skripsi. Pengolahan dan analisis data yang dilaksanakan setelah data terkumpul secara kualitatif yang akan disajikan dalam bentuk deskriptif (menggambarkan atau menguraikan).[33]

---

[32] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara,2003), hal, 641.

[33] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2012), hal, 338.

G. Teknik Keabsahan Data

Peneliti benar-benar langsung terjun kelapangan untuk mencek data yang mungkin dimasukkan dalam penelitian ini, oleh karena itu data yang ada dilapangan peneliti membuat dengan tiga langkah, adapun tiga langkah tersebut adalah :

1. Perpanjangan keikutsertaan

   Perpanjangan keikutsertaan juga menuntut peneliti agar terjun kelokasi dan dalam waktu yang diperlukan guna mencari informasi sekaligus untuk mencek data yang diberikan oleh kepala Desa dan masyarakat umum apakah sesuai dengan kejadian yang ada pada lapangan.

2. Ketekunan pengamatan

   Ketekunan pengamatan juga menuntut peneliti agar terjun kelokasi dan dalam waktu yang diperlukan guna mencari informasi sekaligus untuk mencek data yang diberikan oleh Tokoh Masyarakat dengan kejadian yang ada dilapangan.

3. Triangulasi

   Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber

lainnya, maksudnya data yang diperoleh selain dari hasil wawancara.[34]

Triangulasi meliputi tiga cara yaitu :

a. Triangulasi sumber

   Triangulasi sumber yaitu membandingkan, mencek ulang derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan data dari sumber primer dan skunder.

b. Triangulasi waktu

   Triangulasi waktu adalah menguji derajat kepercayaan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dalam waktu atau situasi yang berbeda. Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku manusia selalu mengalami perubahan dari waktu kewaktu. Untuk mendapatkan data yang shahih peneliti perlu melakukan pengamatan yang berulang-ulang.

c. Triangulasi teknik

   Triangulasi teknik adalah usaha mencek keabsahan data atau mencek keabsahan temuan peneliti. Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data dari observasi dan wawancara.

---

[34] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 168.

BAB IV

HASIL DAN PENELITIAN

1. Temuan Umum

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) BERSAMA SARASI, merupakan salah satu program Pemerintah dalam mensejahterakan perekonomian masyarakat menengah ke bawah. BUMDes diharapkan mampu dalam memberdayakan masyarakat dari seluruh aspek khususnya ekonomi.

a. Gambaran Umum

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) BERSAMA SARASI berdiri tanggal 01 Maret 2016. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah peralihan dari PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan) yang berakhir pada Desember 2014. BUMDes BERSAMA SARASI sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan sumber daya ekonomi umum yang dikelola oleh desa atau kerjasama antara desa para anggotanya atas partisipan kaedah-kaedah ekonomi.

Tujuan didirikan BUMDes BERSAMA SARASI adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945.[35]

[35] https://berkas.dpr.go.id.bumdes, diakses 18 Juni 2021.

Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Proses simpan pinjam BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), untuk kalangan masyarakat yang sudah memiliki usaha, sehingga ada surat pengantar dari kepala desa jika ingin mengajukan pinjaman, dengan suku bunga yang rendah, berbeda dengan simpan pinjam yang dilakukan di Bank, bisa untuk semua kalangan dan bersifat perorangan dan bisa untuk semua kalangan amsyarakat.

Pengelola BUMDes BERSAMA SARASI saat ini terdiri dari Kepala Unit, Staf Keuangan, Staf Administrasi, Staf Analisis kredit, dan Staf colektor yang bertanggungjawab sesuai peran dan fungsinya masing-masing dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan, pengelola dibentuk sesuai dengan proses pelaksanaan kegiatan. Selain pengelola ada juga pengurus yang berkewajiban menyelenggarakan dan mengendalikan organisasi dan usaha BUMDes BERSAMA SARASI.

Menurut bapak Syahril Ali, pengelola dan pengurus berbeda dalam menjalankan tugasnya masing-masing, seperti staf keuangan BUMDes bertugas tugas mengelola dan mengaudit setiap keuangan yang masuk dan keluar. Pengelola adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi, potensi serta melayani anggota secara langsung berkaitan dengan pekerjaannya,

sedangkan pengurus adalah orang-orang yang dipilih oleh para anggota dalam hasil rapat.[36]

Berikut Susunan Pengurus dan Pengelola BUMDes BERSAMA SARASI Kecamatan Angkola Selatan.

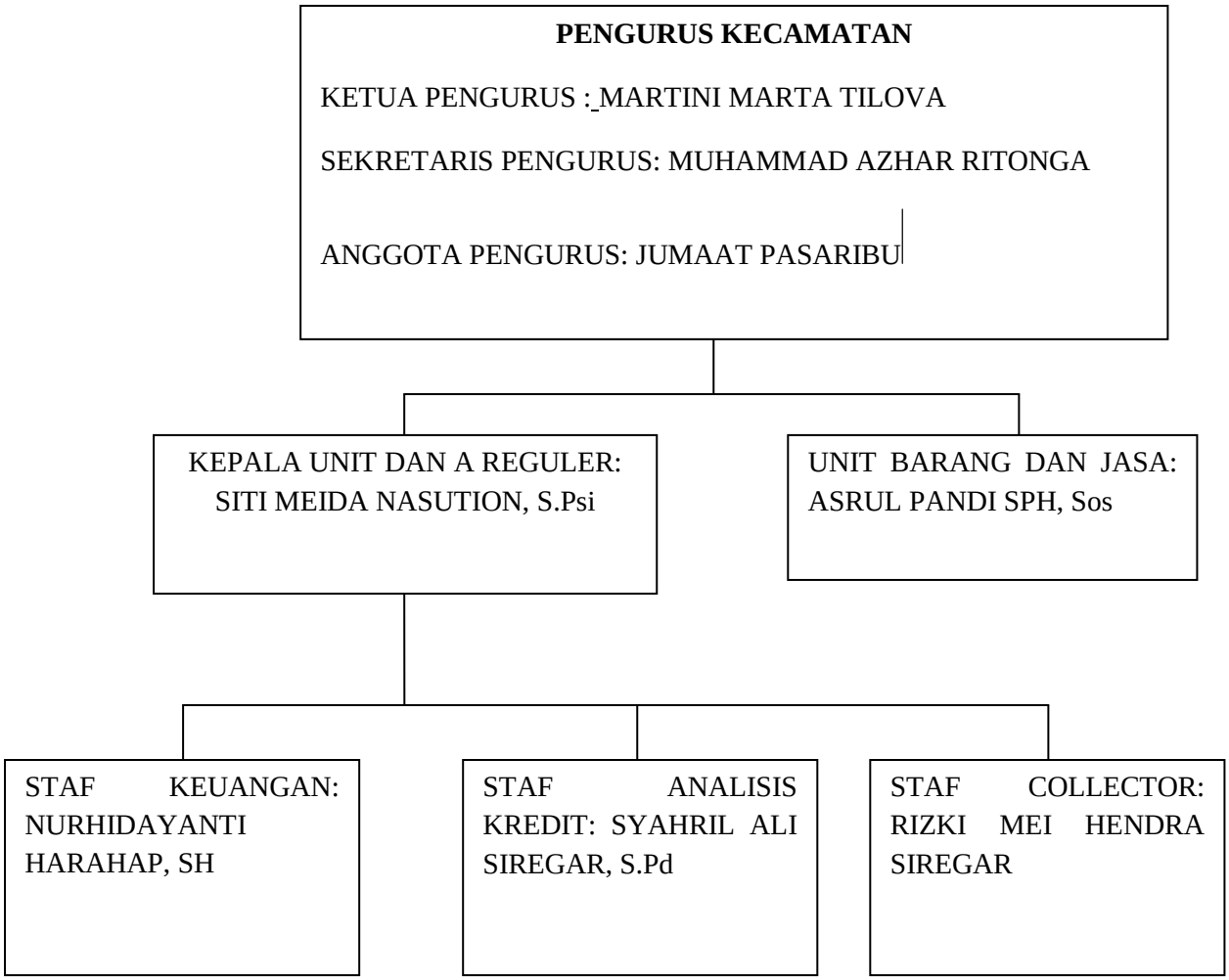

[36] Syahril Ali, Staf BUMDes, wawancara 18 Juni 2021.

BUMDes BERSAMA SARASI di Kecamatan Angkola Selatan. Angkola Selatan adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota kecamatan ini berada di kelurahan Simarpinggan. Namun kecamatan ini sebelumnya adalah Siais, tetapi diubah pada tahun 2007.

Sebelum adanya BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), masyarakat yang tergolong ekonomi lemah, merasa kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena terkendala dengan modal (uang), sehingga perekonomian masyarakat tidak berkembang. Namun setelah adanya BUMDes, pemerintah dan seluruh staf BUMDes berupaya semaksimal mungkin membantu masyarakat dalam mengemnagkan usahanya guna meningkatkan perekonomian masyarakat yang tergolong ekonomi lemah.[37]

b. Geografis dan Demografis Wilayah

Dalam Sensus Penduduk Indonesia 2020, jumlah penduduk kecamatan ini sebanyak 32.757 jiwa.[38] Masyarakat Tapanuli Selatan, pada umumnya merupakan suku batak Angkola, dan ada juga sebahagian besar lainnya suku Batak Toba dan Batak Mandailing. Beberapa suku lainnya juga ada seperti Batak Karo, Batak Simalungun, Nias dan suku pendatang di luar Sumatera Utara seperti suku Aceh, jawa, minangkabau, dan lainnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Tapanuli Selatan mencatat bahwa mayoritas penduduk dapat dilihat melalui tabel berikut :

---

[37] Syahril Ali, Staf BUMDes, Wawancara 18 Juni 2021.

[38] "Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka 2021" (pdf). www.tapanulislatankab.bps.go.id hlm. 7, 55, 124-125. Diakses tanggal 23 Mei 2021

Tabel 4.1

Agama	Persen (%)
Islam	57,31%
Nasrani	42,69%
Kristen Protestan	38,88%
Katolik	3,81%

Sumber : Data Kecamatan tahun 2020

Wilayah ini terdiri dari Kelurahan, Desa, Ada 4 kelurahan yang terdiri dari Napa, Pardomuan, Simarpinggan dan Tapian Nauli, dan 13 desa yaitu Aek Natas, Dolok Godang, Gunung Baringin, Perkebunan Marpinggan, Pintu Padang, Siamporik Dolok, Siamporik Lombang, Sibongbong, Sihopur, Sihuik kuik, Sinyior, Situmbaga dan Tandihat.

c. Mata Pencaharian

Mayoritas Mata pencaharian masyarakat kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan ialah sebagai wiraswasta, petani, buruh tani, pegawai negeri, dan pedagang. Pada umumnya masyarakat Angkola Selatan lebih dominan bekerja sebagai petani dan buruh tani sebagai sumber penghasilan masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun sebahagian masyarakat bekerja sebagai PNS dan lain sebagainya.[39]

[39] Rahina sihombing, Masyarakat Aek Natas, Observasi dan Wawancara 20 Juni 2021.

Tabel 4.2

Mata Pencaharian

Mata Pencaharian	Persen (%)
Petani	48%
Buruh Kasar	27%
PNS	15%
TNI	10%

Sumber : Data Statistik tahun 2020

Berdasarkan data statistik tahun 2020, dapat kita ketahui bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan ini adalah bertani, yaitu bertani sawah sebagai sumber penghasilan.[40]

2. Temuan Khusus

a. Implikasi BUMDes terhadap ekonomi masyarakat.

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyakat, khususnya di kecamatan Angkola Selatan. Ada beberapa implikasi BUMDes dalam mengembangkan perekonomian masyarakat, antara lain sebagai berikut :

1) Penambahan Modal Usaha

Adanya unit usaha simpan pinjam dan penambahan modal dari BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) secara langsung berupa uang maupun barang tentunya memiliki beberapa dampak terutama untuk masyarakat yang memiliki usaha. Seperti yang dirasakan oleh

[40] https//:statistik_pusat_badan_angkola,diakses 27 Juni 2021.

beberapa masyarakat yang dulunya harus meminjam ke Bank Konvensional dengan izin yang lama kini masyarakat dapat meminjam dengan mudah ke BUMDes dengan alur izin yang cukup terjangkau serta tempat yang tidak begitu jauh.

> Hal ini sesuai dengan yang disampaikan ibu Irayani Caniago, hadirnya BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) di tengah-tengah masyarakat sangat membantu dalam hal penambahan modal usaha, meskipun proses peminjaman yang dilakukan tidak bersifat individu melainkan kelompok. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses peminjaman melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yaitu surat permohonan, KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), pas foto pemohon dan surat keterangan usaha dari kepala Desa.[41]
>
> Tukmiyanti, mengatakan hadirnya BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) membantu masyarakat dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat dapat menambah dan memperbesar usahanya melalui simpan pinjam BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).[42]
>
> Hal senada disampaikan Ibu Indah Permata Sari, bahwa simpan pinjam melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) membantu masyarakat, khususnya Kecamatan Angkola Selatan dalam hal menambah modal usaha, apalagi proses simpan pinjam tidak memberatkan masyarakat dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan uang hasil pinjaman yang diterima langsung diberikan kepada nasabah (penerima simpan pinjam BUMDes) setelah semua persyaratan dan administrasi sudah disetujui oleh staf BUMDes(Badan Usaha Milik Desa).[43]

2) Peningkatan pendapatan.

Implikasi pada sebuah pemberdayaan tentunya mempunyai tujuan yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dari paparan di atas

---

[41] Irayani Caniago, Ketua Kelompok Peminjam, wawancara tanggal 10 Juni 2021.

[42] Tukmiyanti, Ketua Kelompok Peminjam, wawancara tanggal 13 Juni 2021.

[43] Indah Permata Sari, Ketua Kelompok Peminjam, wawancara tanggal 11 Juni 2021.

menunjukkan bahwa peningkatan taraf hidup masyarakat dapat dlihat dari banyaknya usaha yang berdiri di bawah naungan BUMdes meskipun banyak kendala yang dihadapi namun tidak sedikit yang menunjukkan keberhasilan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan bapak Syahril Ali Siregar bahwa setiap program BUMDes pasti memiliki hambatan dan tantangan tersendiri, tidak ada sebuah program berjalan mulus saja tanpa ada kendala, hanya saja bagaimana seluruh staf BUMDes bekerjasama mencari solusinya.

Ibu Riana mengatakan bahwa dengan adanya BUMDes dapat menambah pendapatan sehari², seperti sawah yang saya miliki hanya 1 petak tetapi dengan adanya BUMDes dapat menjadi 2 petak atau lebih sehingga pendapatan saya bertamabah.[44]

Artinya, BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) membantu dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat yang kurang berdaya menjadi berdaya setelah adanya simpan pinjam BUMDes.Hal yang sama disampaikan ibu Sahrida, stelah adanya BUMDes ekonomi masyarakat disini terbantu, meskipun tidak sepenuhnya bisa dikatakan sejahtera, tapi dengan adanya BUMDes sudah sangat membantu masyarakat yang tinggal di desa ini.[45]

[44] Riana Sihombing, Anggota Kelompok Peminjam, Wawancara 18 Juni 2021
[45] Ibu Sahrida, Anggota Kelompok peminjam, wawancara 20 juni 2021

3) Meningkatkan wawasan staf/ pegawai BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

Studi banding maupun pelatihan mempunyai tujuan meningkatkan wawasan staf BUMDes. Wawasan yang bertambah tentunya memberikan implikasi yang baik bagi keberlangsungan BUMdes kedepannya. Hal ini sesuai dengan apa yg disampaikan bapak Syahril Arif bahwa studi banding atau pelatihan merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh staf BUMDes dalam mengembangkan potensi – potensi SDA dan SDM.

Ibu Sarika mengatakan bahwa adanya pelatihan yang dilakukan oleh BUMDes dapat diajarkan kepada masyarakat sehingga usaha - usaha yang dikerjakan masyarakat dapat berkembang.[46]

Ibu Nani juga mengatakan bahwaa dengan adanya pelatihan yang telah dilakukan BUMDes dapat memperkaya pengetauan masyarakat khususnya petani dalam mengembangkan usahanya.

Hal yang sama disampaikan ibu Rohana Batubara bahwa pinjam meminjam yag dilakukan lewat BUMDes sangat membantu masyarakat ekonomi lemah, memang benar bahwa peminjaman yg dilakukan bersifat kelompok tetapi pegembangan usahanya bersifat individu.[47]

Bapak Syahril Ali mengatakan bahwa dibuatnya sistem simpan pinjam perkelompok bukan bersifat individu, tetapi uang yang diterima perkelompok akan dibagi oleh ketua kelompok kepada setiap anggota

[46] Ibu Sarika, Anggota Kelompok peminjam, wawancara 12 juni 2021
[47] Ibu Rohana, Anggota Kelompok Peminjam, Wawancara 15 Juni 2021

untuk menambah modal usahanya. Alasan dibuatnya sistem simpan pinjam berbentuk kelompok yaitu menjadi satu cara agar masyarakat tidak kesulitan dalam membayar cicilan simpan pinjam.[48]

Menurut Ibu Nurhidayanti, Implikasi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) terhadap ekonomi masyarakat kecamatan Angkola Selatan berupa bantuan modal yang diberikan oleh BUMDes BERSAMA SARASI kepada masyarakat menengah ke bawah dan berfungsi untuk mengembangkan usaha mereka dalam bidang masing-masing seperti kedai warung, petani, dan ternak sehingga masyarakat angkola selatan dapat mengembangkan usahanya.[49]

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Ibu Irayani Caniago merupakan ketua kelompok peminjam pada BUMDes BERSAMA SARASI. Beliau mengatakan umtukmenyelesaikan permasalahan tentang ingkar-janji perjanjian dalam simpan pinjam tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan karena masalah yang dihadapi anggotanya tersebut agar tidak sampai jalur hukum. Berdasarkan hasil wawancara yang dijelaskan ibu tersebut diselesaikan dengan jalur musyawarah atau kekeluargaan.[50]

---

[48] Syahril Ali Siregar , Sebagai Staf Analisis Bumdes Bersama, wawancara di kantor Bumdes, Kamis, tanggal 28 Juni 2021, Jam 10:40 WIB.

[49] Nurhidayanti, Staf Keuangan BUMDes, Wawancara 28 Juni 2021.

[50] Ibu Irayani Caniago, Ketua Kelompok Peminjam, wawancara tanggal 10 Juni 2021

b. Faktor - Faktor Pendukung dan Penghambat BUMDes BERSAMA SARASI.

Faktor merupakan hal atau keadaan yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Faktor pendukung adalah sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek yang menjadi sebab berkembangnya suatu usaha yang dijalankan. Hal ini juga tidak terlepas dari keberadaan BUMDes BERSAMA SARASI partisipasi tindakan proaktif masyarakat

a) Faktor Pendukung BUMDes BERSAMA SARASI

Faktor-faktor pendukung BUMDes terdiri dari beberapa faktor antara lain sebagai berikut :

a. Kerjasama

Kerjasama antar masyarakat menjadi faktor pendukung dalam proses pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya.

Kerjasama dengan Pemerintahan yaitu menurut PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) Tapsel Muhammad yusuf nasution pemerintahan dan masyarakat harus sama-sama satu visi

dan merasakan memiliki BUMDes sehingga bermanfaat untuk membangkitkan perekonomian masyarakat banyak.[51]

Artinya tidak hanya Pemerintahan saja yang ingin membangkitkan perekonomian masyarakat, tetapai masyarakat juga harus sadar dan sama-sama bangkit dari yang tidak berdaya menjadi berdaya. Hal ini menjadi poin penting dalam menyatukan visi misi antara Pemerintah kepada masyarakat agar sama-sama diterapkan dan dijalankan bersam-sama demi ekonomi yang lebih sejahtera.

Camat Angkola Selatan Dodi Kurniawan juga mengharapkan peran kepala desa dan lurah sekecamatan Angkola Selatan untuk mengedukasi mayarakat, mengudukasi dalam arti mengembangkan usaha-usaha masyarakat agar dapat memanfaatkan BUMDes dengan baik, sehingga bermanfaat seperti pengembalian yang tepat waktu.[52]

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ibu Hartati, bahwa kerjasama antar masyarakat menjadi satu point dalam pengelolaan ekonomi masyarakat.[53]

Aminah sari juga mengatakan bahwa kerjasama antara masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan dalam menunjang kesejahteraan ekonomi, tanpa adanya kerjasama antara kedua

---

[51] LPJ BUMDES Bersama Sarasi Kec. Angkola Selatan *"https://sumurungnews.com/2020/01/29/lpj-bumdes-bersama-sarasi-kec-angkola-selatan*" Diakses tanggal 23 Mei 2021

[52] Dodi Kurniawan, Camat Angkola Selatan, Wawancara 18 Juni 2021.

[53] Hartati Siregar, Masyarakat Angkola Selatan, Wawancara 12 Juni 2021.

belah pihak maka dana BUMDes tidak akan bisa berjalan sesuai dengan program-programnya, bentuk kerjasama antar kelompok dalam sistem simpan pinjam BUMDes yaitu saling tolong menolong jika ada anggota yang terkendala dalam proses pembayaran.[54]

b. Usaha Individu

Faktor pendukung yang berasal dari dalam yaitu adanya niat dan semangat individu dalam berusaha. Faktor ini turut menentukan keberhasilan pencapaian hasil. Niat yang kuat akan membuat individu akan semaksimal mungkin untuk mengikuti pemberdayaan dari awal hingga akhir. Leliana mengatakan bahwa sebelum menerima bantuan ataupun pinjaman dari BUMDes niat dan usaha harus sejalan.[55]

Irma suriani juga mengatakan kesungguh-sungguhan masyarakat dapat dilihat dari bagaimana bentuk usahanya, sehingga bagaimana proses dan sistem simpan pinjam yang sudah disepakati akan berjalan dengan baik dan tidak ada masyarakat yang terkendala dan terkena denda akibat tidak sanggup membayar cicilan yang sudah disepakati bersama.[56]

Menurut Pemerintah Desa, bapak Syahril Ali Siregar apabila masyarakat sudah meluruskan niat dan berusaha dengan baik, maka tidak akan ada penghambat dari berjalannya setiap

[54] Aminah Sari, Masyarakat Angkola Selatan, Wawancara 13 Juni 2021.
[55] Leliana, Masyarakat Angkola Selatan, Wawancara 09 Juni 2021.
[56] Irma Suriani Daulay, Masyarakat Angkola Selatan, Wawancara 18 Juni 2021.

program-program BUMDes di tengah-tengah masyarakat, dan pemerintah tidak merasa kesulitan dalam mengelola setiap dana BUMDes yang masuk.[57]

c. Potensi SDA (Sumber Daya Alam)

Potensi SDA (Sumber Daya Alam) yang melimpah merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki sebagai peluang dalam memberdayakan masyarakat sekitar. Potensi di Angkola Selatan tergolong baik, apalagi dalam cocok tanam menanam, hal ini sesuai dengan yang disampaikan ibu Sartika bahwa potensi SDA (Sumber Daya Alam) mendukung semua kegiatan masyarakat, baik untuk berkebun maupun bertani, sehingga dengan adanya dana BUMDes membantu dalam pengelolaan sawah masyarakat.[58]

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Sunarti bahwa adanya bantuan dana BUMDes sangat mendukung masyarakat sebagai bentuk menunjang perekonomian, upaya pemerintah dalam membantu masyarakat untuk kesejahteraan ekonomi sudah dapat direalisasikan dalam bentuk simpan pinjam BUMDes bagi masyarakat kecil. Sebelum BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) diperkenalkan kepada masyarakat, perekonomian masyarakat cukup memperhatinkan apalagi saat modal usaha tidak memadai,

[57] Syahril Ali Siregar, Staf BUMDes, Wawancara 18 Juni 2021.
[58] Sartika siregar, Masyarakat Angkola Selatan, Wawancara 12 Juni 2021.

adanya BUMDes menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha.[59]

d. Dukungan dari Pemerintah melalui BUMDes

Dukungan merupakan salah satu faktor pendukung yang dapat mebantu kelacaran pemberdayaan. Adanya dukungan memudahkan dalam menjalin kerjasama dan menekan timbulnya konflik yang mungkin disebabkan akibat perbedaan pendapat.

Bapak Amran mengatakan bahwa perengkat Desa mendukung penuh segala bentuk usaha masyarakat melalui BUMDes, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak terberdayakan ekonominya.[60]

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Sumarni bahwa pemerintah berusaha mendata seluruh masyarakat yang tergolong ekonomi lemah, agar ikut serta dalam kelompok simpan pinjam BUMDes untuk menambah modal usaha.[61]

Hal senada disampaikan ibu Tika sari bahwa pemerintah *door to door* mendata masyarakat agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengetahui bentuk simpan pinjam BUMDes, ini adalah

[59] Sunarti, Masyarakat Angkola Selatan, Wawancara 13 Juni 2021.
[60] Amran, Perangkat Desa, Wawancara 18 Juni 2021.
[61] Sumarni, Masyarakat Angkola Selatan, Wawancara 19 Juni 2021.

salah satu bentuk dukungan yang diberikan seluruh perangkat desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.[62]

Bapak Syahril Ali Siregar, selaku staf analisis BUMDes BERSAMA SARASI mengatakan cara lain mendukung masyarakat dengan melakukan edukasi dan trening kepada masyarakat. Contohnya melakukan pertemuan dengan kelompok – kelompok peminjam yang ada di desa dan kelurahan dikecamatan angkola selatan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat bagaimana fungsi BUMDes.[63]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sari Devi Siregar, ia mengatakan bahwa membantu perekonomian masyarakat terutama orang yang ikut serta dalam kegiatan yang ada pada BUMDes BERSAMA SARASI, hal ini terlihat dari antusias masyarakat dalam meminjam untuk penambahan modal usaha sehingga perekonomian masyarakat dapat terbantu. Harapan mereka semoga BUMDes yang ada di kecamatan angkola selatan ini dapat terus berkembang dalam membangun ekonomi masyarakat yang lebih baik.[64]

---

[62] Tika Sari, Masyarakat Angkola Selatan, Wawancara 14 Juni 2021.
[63] Syahril Ali Siregar, Staf BUMDes, Wawancara 17 Juni 2021.
[64] Ibu Sari Devi Siregar, Anggota Kelompok Peminjam, Wawancara 18 Juni 2021.

b) Faktor Penghambat BUMDes BERSAMA SARASI

Hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Pada penelitian ini, faktor penghambat dalam pengembangan masyarakat melalui BUMDes BERSAMA SARASI dan Implikasinya terhadap masyarakat didefinisikan sebagai hal ataupun keadaan yang dapat merintangi, menahan dan menghalangi proses BUMDes BERSAMA SARASI.

Adapun faktor-faktor penghambat BUMDes antara lain sebagai berikut :

a. Minimnya SDM (Sumber Daya Manusia)

Minimnya SDM (Sumber Daya Manusia) menjadi salah satu faktor penghambat berjalannya program-program BUMDes, minimnya SDM misalnya banyaknya para perangkat desa yang merangkap jabatan, sehingga program-program ini terkendala dengan kesibukan para perangkat desa. Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimaksud yaitu masyarakat kurang memahami bagaimana sistem pekerjaan yang ada di BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), sehingga para staf kesulitan dalam mencari anggota baru dalam menjalankan program-program yang ada.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan bu Riana bahwa sebahagian perangkat desa sangat sibuk dengan pekerjaan

yang lain sehingga kurang memperhatikan masyarakat yang tergolong ekonomi lemah.[65]

Ibu Endang mengatakan kurangnya SDM yang berpendidikan menjadi satu permasalah tersendiri dan menghambat berjalnnya setiap program-program masyarakat yang ada di Angkola Selatan.[66]

Bapak Syahril Ali Siregar juga mengatakan, minimnya SDM menjadi salah satu faktor penghambat kurang efektifnya setiap program-program BUMDes, tetapi permasalahan ini sudah dimusyawarahkan dengan masyarakat hanya saja belum menemukan SDM yang tepat dalam memnuhi setiap tanggung jawab dalam menjalankan setiap program-program BUMDes.[67]

b. Minimnya Anggaran Dana Kepada Masyarakat

Anggaran dana yang disediakan untuk program pemberdayaan BUMDes masih dirasakan kurang karena BUMDes sendiri memiliki program - program yang harus direalisasikan. Anggaran yang sedikit harus dibagi-bagi lagi mengakibatkan usaha tidak bisa berkembang secara pesat. Apalagi dana yang diterima perkelompok dibagi lagi ke anggota masing-masing. Dana yang diterima perkelompok sebesar Rp. 1.800.000,- dibagi kepada 6 orang menjadi Rp. 300.000,-.

---

[65] Riana Sihombing, Anggota Kelompok Peminjam, Wawancara 18 Juni 2021.
[66] Endang, Anggota Kelompok Peminjam, Wawancara 20 Juni 2021.
[67] Syahril Ali Siregar, Staf BUMDes, Wawancara 18 Juni 2021.

Berdasarkan observasi dengan ibu Sari, beliau mengatakan bahwa anggaran yang sedikit harus dibagi-bagi kepada beberapa kelompok masyarakat, sehingga tidak efektif dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat.[68]

Salimah juga mengatakan seluruh program harus berjalan sesuai dengan yang diharapkan perangkat desa tetapi dana BUMDes tidak cukup menampung seluruh program-program tersebut sehingga masyarakat tidak cukup dalam membantu unit usaha.[69]

Sarita mengatakan seharusnya program BUMDes satu demi satu dijalankan, sehingga dana BUMDes dapat lebih optimal dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, jika seluruh program BUMDes dijalankan secara bersama-sama tidak bisa optimal dalam memberdayakan ekonomi masyarakat karena dana BUMDes yang minim.[70]

c. Kurangnya Pengelolaan Keuangan Masyarakat

Pengelolaan keuangan adalah salah satu point penting dalam sebuah program, karena dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat berhasil atau tidaknya program tersebut di tengah-tengah masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Syahril Ali Siregar, selaku staf BUMDes BERSAMA SARASI mengatakan bahwa ketika mereka ke lapangan untuk mengutip

[68] Ibu Sari, Anggota Kelompok Peminjam, Wawancara 20 Juni 2021.
[69] Salimah, Anggota Kelompok Peminjam, Wawancara 19 Juni 2021.
[70] Sarita, Anggota Kelompok Peminjam, Wawancara 21 Juni 2021.

pinjaman dari BUMDes, mereka mengatakan bahwasanya sebahagian yang mereka kutip tidak dapat membayar simpan pinjam pada waktu yang ditetapkan. Karena alasan masyarakat yang terkait mengatakan bahwa pinjaman yang diberikan tidak dikelola dengan baik, tetapi mempergunakannya untuk kebutuhan sehari – hari.[71]

Kurangnya pengelolaan keuangan masyarakat menjadi masalah bagi dana BUMDes, karena tidak berjalannya proses simpan pinjam masyarakat, hal ini seharusnya dapat diantisipasi oleh perangkat desa dengan melakukan sosialisasi kepada setiap masyarakat yang meminjam.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan ibu Rohana, bahwa staf BUMDes harusnya mengontrol setiap kegiatan yang masyarakat lakukan sehingga dapat melihat secara optimal pengelolaan keuangan masyarakat, sehingga saat pembayaran tidak ada alasan tidak memiliki uang untuk membayar simpan pinjam.[72]

Ibu yulia juga mengatakan kurangnya perhatian staf BUMDes dari apek pengawasan usaha yang dijalani masyarakat, membuat masyarakat tidak tepat waktu dalam pembayaran simpan pinjam, dan masyarakat salah mempergunakan

[71] Syahril Ali Siregar, Staf Analisis Bumdes Bersama, Wawancara 28 Juni 2021.
[72] Rohana, Anggota Kelompok Peminjam, Wawancara 21 Juni 2021.

pengelolaan keuangannya, yang harusnya untuk membayar pinjaman menjadi memenuhi kebutuhan sehari-hari.[73]

[73] Yulia, Anggota Kelompok Peminjam, Wawancara 20 Juni 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya tentang pengembangan masyarakat melalui BUMDes BERSAMA SARASI dan implikasinya terhadap perekonomian masyarakat kecamatan Angkola Selatan.

1. Implikasi BUMDes bersama sarasi dalam mengembangkan perekonomian masyarakat adalah kemudahan menambah modal usaha, peningkatan pendapatan dan meningkatkan wawasan staf BUMDes.
2. faktor pendukung dan penghambat BUMDes BERSAMA SARASI dalam meningkatkan Perekonomian Masyarakat. Faktor faktor pendukung BUMDes dlm perekonomian masyarakat adalah kerjasama, niat dan usaha individu dalam berusaha, potensi SDA dan Dukungan dari masyarakat untuk pemerintah Desa, sedangkan faktor-faktor penghambat BUMDes dlm perekonomian masyarakat adalah minimnya SDM, Minimnya Anggaran Dana Kepada Masyarakat dan Kurangnya Pengelolaan Keuangan Masyarakat.

B. **Saran**

Terlepas dari keterbatasan yang ada, implikasi dari penelitian ini untuk menunjang penelitian selanjutnya agar lebih baik, adapun saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu:

1. Kepedulian BUMDes diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan, penyaluran, dan pengawasan dana simpan pinjam dengan baik dan optimal serta pentingnya melakukan pendekatan dengan masyarakat agar data yang ditemukan dapat lebih mendalam.

2. Peran BUMDes diharapkan mampu menciptakan hal-hal maupun temuan-temuan yang baru untuk peningkatan BUMDes.

3. BUMDes diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan keuangan dengan menggunakan sistem akuntansi sehingga data yang ada tidak berceceran dan tersimpan rapi. Meningkatkan dan memperkuat pola komunikasi antara Lembaga Desa dengan melakukan pertemuan rutin bulanan untuk membahas perkembangan BUMDes sehingga perkembangan BUMDes dapat diketahui oleh segala pihak yang ada di Kecamatan Angkola Selatan, agar lebih meningkatkan unit kegiatan usaha sehingga meningkatkan pendapatan BUMDes dan dapat disalurkan ke kas Desa sehingga peran BUMDes BERSAMA SARASI lebih terlihat sebagai Badan Usaha di Kecamatan Angkola Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

"Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Angka 2021" (pdf). www.tapanulislatankab.bps.go.id hlm. 7, 55, 124-125. Diakses tanggal 23 Mei 2021

Acep Aripudin, *Sosiologi Dakwah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013)

Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu)

Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kwalitatif PTK dan Penelitian Pengembangan*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2016)

Ahmad Nizar, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Cipta Pustaka Media, 2014)

Aminah Sari, Masyarakat Angkola Selatan, Wawancara 13 Juni 2021.

Amran, Perangkat Desa, Wawancara 18 Juni 2021.

Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: KEMENDES, 2015)

Ari H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, , (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)

Arif Budimanta, *Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development*, (Jakarta: CSD, 2008)

Ayub M. Padangaran, *Management Proyek Pengembangan Masyarakat*, (Kendari: Unhalu Press, 2011)

bu Irayani Caniago, Ketua Kelompok Peminjam, wawancara tanggal 10 Juni 2021

BUMDes, *Pengembangan Masyarakat Melalui BUMDes Berasama Sarasi Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Masyarakat*, Angkola Selatan.

Dedy Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009)

Dodi Kurniawan, Camat Angkola Selatan, Wawancara 18 Juni 2021.

Edi Soharto, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan dan Pekerjaan Social*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009)

Endang, Anggota Kelompok Peminjam, Wawancara 20 Juni 2021.

Hartati Siregar, Masyarakat Angkola Selatan, Wawancara 12 Juni 2021.

Herry Kamaroesid, Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016

Herry, *Buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes)*

https//:statistik_pusat_badan_angkola,diakses 27 Juni 2021.

https://berkas.dpr.go.id.bumdes, diakses 18 Juni 2021.

Ibu Rohana, Anggota Kelompok Peminjam, Wawancara 15 Juni 2021

Ibu Sahrida, Anggota Kelompok peminjam, wawancara 20 juni 2021

Ibu Sari Devi Siregar, Anggota Kelompok Peminjam, Wawancara 18 Juni 2021.

Ibu Sari, Anggota Kelompok Peminjam, Wawancara 20 Juni 2021.

Ibu Sarika, Anggota Kelompok peminjam, wawancara 12 juni 2021

Indah Permata Sari, Ketua Kelompok Peminjam, wawancara tanggal 11 Juni 2021.

Irayani Caniago, Ketua Kelompok Peminjam, wawancara tanggal 10 Juni 2021.

Irma Suriani Daulay, Masyarakat Angkola Selatan, Wawancara 18 Juni 2021.

Jim Ife, *Community Development: creating community Alternati-ves-Vision, Analysis and Practice, (Melbourne: Addison Wesley Longman,*2000)

Jurnal Administrasi Publik(JAP), *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguat Ekonomi Desa,* Vol. 1, No. 6

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional Indonesia,2014)

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* , (Jakarta: Aksara Baru, 2000)

Leliana, Masyarakat Angkola Selatan, Wawancara 09 Juni 2021.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000)

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000)

LPJ BUMDES Bersama Sarasi Kec. Angkola Selatan *"https://sumurungnews.com/2020/01/29/lpj-bumdes-bersama-sarasi-kec-angkola-selatan*" Diakses tanggal 23 Mei 2021

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara,2003)

Masri Singarimbu dan sofyan efendi, *Metode Penelitian Survey,* (Jakarta: LP3S, 1989)

Moeljarto Tjokrowinoto. *Pembangunanan Dilema Dan Tantangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005)

Nurhidayanti, Staf Keuangan BUMDes, Wawancara 28 Juni 2021.

Rahina sihombing, Masyarakat Aek Natas, Observasi dan Wawancara 20 Juni 2021.

Riana Sihombing, Anggota Kelompok Peminjam, Wawancara 18 Juni 2021

Riana Sihombing, Anggota Kelompok Peminjam, Wawancara 18 Juni 2021.

Rohana, Anggota Kelompok Peminjam, Wawancara 21 Juni 2021.

S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksra, 2003)

Salimah, Anggota Kelompok Peminjam, Wawancara 19 Juni 2021.

Sarita, Anggota Kelompok Peminjam, Wawancara 21 Juni 2021.

Sartika siregar, Masyarakat Angkola Selatan, Wawancara 12 Juni 2021.

Siti Meida Nasution, *Kepala Unit BUMDes BERSAMA SARASI* Angkola Selatan, Wawancara 10 Juni 2021.

Soetomo, *Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2012)

Sukiman, *Pengembangan Media Pembelajaran*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2012)

Sumarni, Masyarakat Angkola Selatan, Wawancara 19 Juni 2021.

Sunarti, Masyarakat Angkola Selatan, Wawancara 13 Juni 2021.

Supardi, *Dakwah Islam Dengan Pengembangan Masyarakat Desa*, (Bandung: Madar Maju, 2001

Supardi. *Manajemen Masjid dalam Pembangunan Masyarakat: Optimalisasi Peran dan Fungsi Masjid*, (Jakarta: UII Press, 1987

Syahril Ali Siregar , Sebagai Staf Analisis Bumdes Bersama, wawancara di kantor Bumdes, Kamis, tanggal 28 Juni 2021, Jam 10:40 WIB.

Syahril Ali Siregar, Staf Analisis Bumdes Bersama, Wawancara 28 Juni 2021.

Syahril Ali Siregar, Staf BUMDes, Wawancara 17 Juni 2021.

Syahril Ali Siregar, Staf BUMDes, Wawancara 18 Juni 2021.

Syahril Ali Siregar, Staf BUMDes, Wawancara 18 Juni 2021.

Syahril Ali, Staf BUMDes, wawancara 18 Juni 2021.

Syahril Ali, Staf BUMDes, Wawancara 18 Juni 2021.

Tika Sari, Masyarakat Angkola Selatan, Wawancara 14 Juni 2021.

Tilar, *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*, (Bandung : Rosda Karya, 1999)

Tukmiyanti, Ketua Kelompok Peminjam, wawancara tanggal 13 Juni 2021.

Wahyudin kessa, *perencanaan pembangunan desa*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Press, 2015)

Yulia, Anggota Kelompok Peminjam, Wawancara 20 Juni 2021.

Zainil Arifin, *Penelitian Pendidikan dan Pradigma Baru*, (Bandung : Rosdakarya,2011)

Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternative*, (Jogjakarta: A-ruzz Media, 2007)

LAMPIRAN II

Dokumentasi
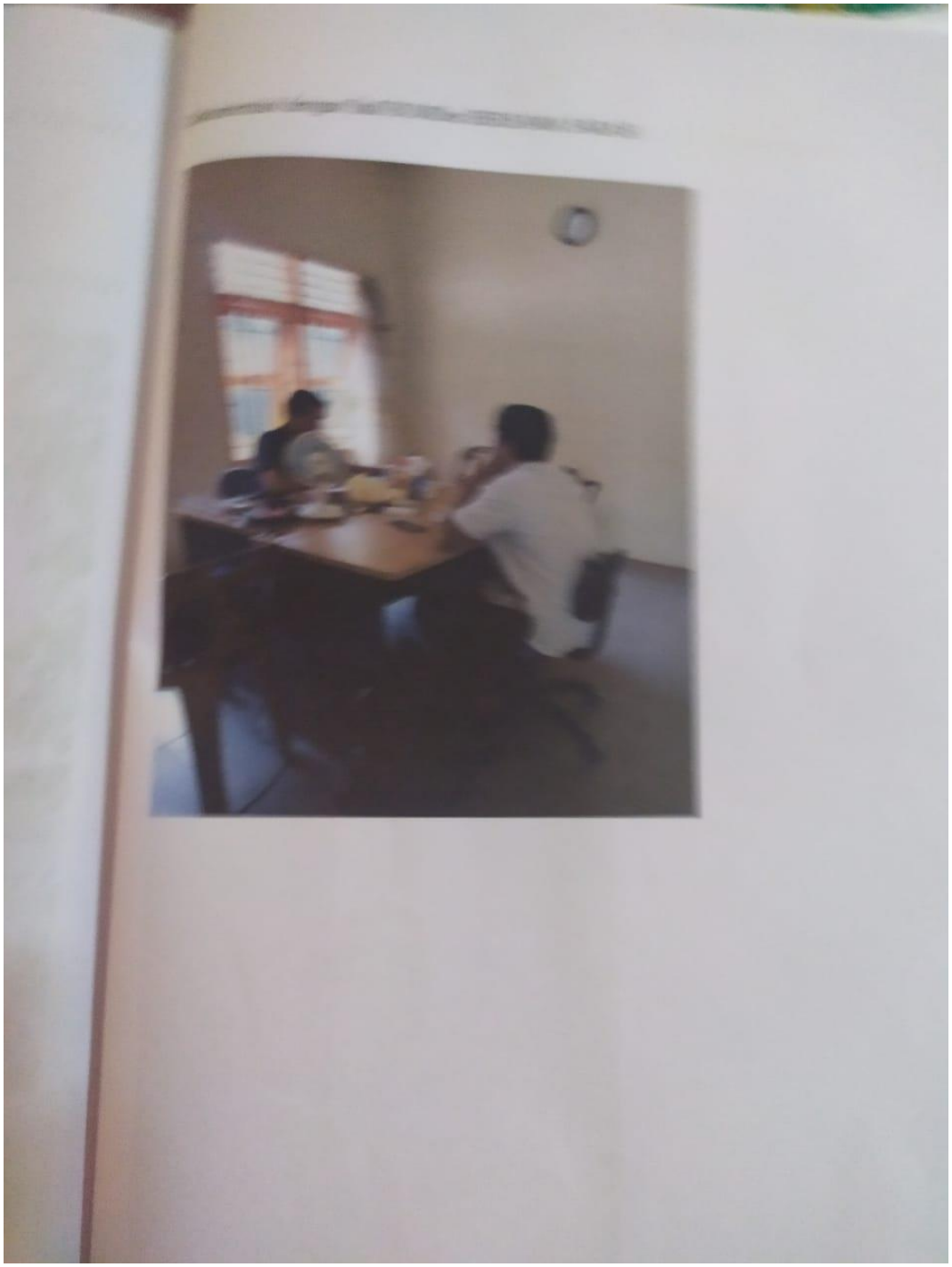
Dokumentasi di BUMDes BERSAMA SARASI